



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Nomor : 184/KPN.W4-U5/SK.RA1.10/II/2025

**TENTANG
RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2025;
2. Bahwa untuk mendorong tercapainya target kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2025;
3. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tingkat pertama; dan
4. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

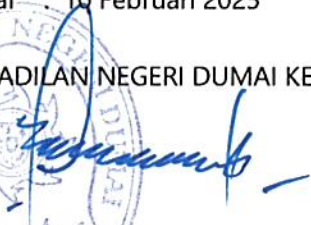
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; dan
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2025.
- Pertama : Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan dokumen yang memuat rencana aksi dan rencana pemantauan (monitoring dan evaluasi) dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025.
- Kedua : Setiap unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkewajiban untuk melaksanakan Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 10 Februari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,


EFENDI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA
Nomor : 184/KPN.W4-U5/SK.RA1.10/II/2025
Tanggal : 10 Februari 2025

RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95	95	95	95
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5	5	5	5
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	95	95	95	95
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	97	97	97	97
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	30	30	30	30
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90	90	90	90

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
1.a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu								154.135.000
1.	Melakukan pendaftaran berkas perkara	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	60.605.000
2.	Melakukan penetapan hari sidang	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	7.820.000
3.	Melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	74.880.000

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
4.	Melakukan minutasi/upaya hukum	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	10.830.000
5.	Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
1.b.	<i>Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</i>								-
1.	Melakukan penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
3.	Peningkatan kemampuan aparaturnya Pengadilan terkait penanganan perkara pidana berbasis keadilan restoratif	√	√	√	√	Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
1.c.	<i>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</i>								6.970.000
1.	Penanganan perkara banding	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	6.970.000
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi pengajuan upaya hukum banding	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
1.d.	<i>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</i>								3.600.000
1.	Penanganan perkara kasasi	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3.600.000
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi pengajuan upaya hukum kasasi	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
1.e.	<i>Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi</i>								-
1.	Penyelesaian perkara anak melalui diversi	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian diversi perkara pidana anak	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
1.f.	<i>Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</i>								7.682.895.000
1.	Peningkatan sarana dan prasarana	√	√	√	√	Unit	Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1.001.543.000
2.	Peningkatan manajemen operasional dan kinerja	√	√	√	√	Layanan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	6.681.352.000
3.	Melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan	√	√	√	√	Laporan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
4.	Melakukan monitoring dan evaluasi indeks kepuasan masyarakat	√	√	√	√	Laporan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat	-

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
								Banding dan Tingkat Pertama	

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3	3	3	3

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
2.a.	<i>Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</i>								5.850.000
1.	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada para pihak berperkara	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	5.850.000
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi pengiriman petikan/salinan putusan	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
2.b.	<i>Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</i>								<i>Setoran biaya proses perkara</i>
1.	Melakukan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Setoran biaya proses perkara
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian mediasi perkara perdata	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-

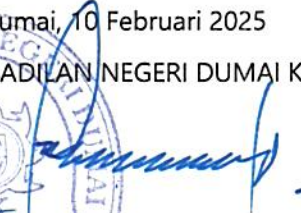
NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	-	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	95	95	95	95

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
3.a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan								-
1.	Melakukan penyelesaian perkara prodeo	-	-	-	-	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara prodeo	-	-	-	-	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
3.b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan								-
1.	Melakukan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan	-	-	-	-	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan	-	-	-	-	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
3.c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)								36.000.000
1.	Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat atau pencari keadilan golongan tertentu sesuai peraturan yang berlaku	√	√	√	√	Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	36.000.000
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi layanan bantuan hukum	√	√	√	√	Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	40	40	40	40

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
4.a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)								Setoran Biaya Proses Perkara
1.	Menerima pendaftaran permohonan eksekusi putusan perkara perdata	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
2.	Melakukan penelaahan rencana eksekusi putusan perkara perdata	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
3.	Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Setoran Biaya Proses Perkara
4.	Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian eksekusi putusan perkara perdata	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-

Dumai, 10 Februari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



EFENDI